IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Ditulis Oleh : Nidia Rismania Dewi
Dosen Tetap Yayasan Prodi Ilmu Administrasi Negara
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
nidia_rd@yahoo.com

ABSTRAK

"Implementasi Kebijakan Kartu Identinas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitiatif. Menurut Bogdan dalam Moleong (2007 : 4) menjelaskan bahwa "Motede kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati" . Untuk mendapatkan analisis kualitatif yang intensif, mendalam,rinci dan tuntas,maka pengumpulan data didalam penelitian ini akan menggunakan sumber data yaitu Observasi,Wawancara dan Penggunaan Dokumen. Setiap Anak wajib mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) yang tercantum dalam kebijakan Permendagri No 2 Tahun 2016. KIA di Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya ini masih bertujuan untuk meningkatkan Pendataan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Anak. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian Juga Pembahasan dalam penelitian kebijakan Implementasi KIA ini dirasa masih kurang karena banyak sekali warga Tasikmalaya khususnya kota Tasikmalaya tidak banyak yang mengetahui apa itu Kartu Identitas Anak (KIA) dan manfaat KIA itu sendiri.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registry Office of Tasikmalaya City"."The research method used is the qualitative research method. According to Bogdan in Moleong (2007: 4) explains that "Qualitative Method is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior". To get an intensive, in-depth, detailed and complete qualitative analysis, the data collection in this study will use data sources namely Observation, Interviews and Use of Documents. Every Child is required to have this Child Identity Card (MCH) listed in Permendagri No. 2 of 2016. KIA at the Tasikmalaya City Population Service is still aimed at improving Data Collection, Protection, and Fulfillment of Children's Rights. Data collection techniques in this study using observation, interviews, and documentation. Research Methods using descriptive research methods with a quantitative approach. Research Results Also The discussion in this MCH policy research was felt to be still lacking because a lot of Tasikmalaya residents

especially the city of Tasikmalaya did not know much about what is a Child Identity Card (MCH) and the benefits of the MCH itself.

***Keywords**: Police implementation, Child Identity Card,*

A. PENDAHULUAN

Kewajiban pemerintah yaitu memberikan identitas kependudukan kepada warga negara Indonesia untuk memenuhi hak sebagai warga Negara Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Keluarlah kebijakan Pemerintah untuk memenuhi hak anak sebagai warga negara di Indonesia . Hal ini diatur sepenuhunya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Program KIA juga telah di muat dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017. Didalam kebijakan tersebut terdapat penjelasan apa itu KIA dan syarat mendapatkan KIA dalam peraturan itu pun tertuang bahwa Kartu Identitas Anak tidak di pungut biaya administrasi sepeser pun.

Kartu Identitas Anak (KIA) hanya bisa diterbitkan di Disduk Capil / Dinas Kependudukan dan Catatan sipil . Dalam KIA ini yaitu mempuanyai tujuan meningkatkan perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai warga negara Indonesia. KIA ada 2 jenis, yaitu KIA untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Untuk anak yang baru lahir KIA diterbitkan dengan akta kelahiran. Tetapi untuk anak yang usianya 5 tahun kurang dan tidak memiliki KIA, persyaratannya yaitu fotocopy akta kelahiran dan memperlihatkan akta kelahiran yang asli kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak hanya akta kelahiran perlu juga membawa kartu keluarga dan KTP asli kedua orang tua/wali. Anak berusia 5-17 tahun dan tidak mempunyai Kartu Identitas Anak, syarat nya hanya akta kelahiran saja. Orang tua mengajukan KIA ke Dinas Kependudukan Catatn Sipil Kota Tasikmalaya untuk menerbitkan KIA bagi anaknya agar hak anak dapat terpenuhi

Dalam Pelaksanaan implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak menurut peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 11 Tahun 2017 ini dalam penjajagan awal penelitian terlihat bahwa masih ketidaktahuan masyarakat yang berada di Kota Tasikmalaya tentang Kartu Identitas Anak. Masyarakat tidak mengetahui manfaat apa saja jika anak mereka memiliki KIA dan Masih banyak kabar yang belum jelas yang di dapatkan oleh Masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak itu sendiri. Banyak masysrakat yang mendengar bahwa Kartu identitas Anak untuk memenuhi persyaratan Sekolah tetapi nyatanya banyak juga sekolah yang tidak memerlukan KIA dalam persyaratan awal.

Implementasi Kebijakan

Tahapan dalam membuat kebijakan yaitu membentuk kebijakan yang bisa mempengaruhi kebijakan dalam masyarakat, Dalam suatu kebijakan itu tidak tepat dan masalah tidak dapat dikurangi yang menjadikan sasaran kebijakan, Dalam hal ini mungkin kebijakan cemerlang pun akan mengalami kegagalan dan sulit untuk mengimplementasikannya secara baik oleh imoplementor kepada penerima kebijakan. Menurut Edward dalam Winarno (2012:125).

Model Implementasi kebijakan , dalam Smith dalam Tachjan (2006: 37) yaitu :

Perumus kebijakan yang memiliki ide atau gagasan untuk mendorong penerima kebijakan sehingga penerima kebijakan bisa melaksanakan kebijakan tersebut (*Idealized policy)*

Kelompok yang manjadi ujung tombak dalam kebijakan dan disesuaikan oleh prilaku yang telah dirumyskan sehingga perumus kebijakan bisa berinteraksi sesuai dengan apa yang diharapkan *(target groups)*

Organisasi yang mempunyai wewenang utama dalam memberikan suatu kebijakan kepada si penerima kebijakan (*Implementing organizatio).*

Pemberi kebijakan harus bisa mempengaruhi lingkungan yang baik terhadap kebijakan di dalam yaitu unsur ekonomi, politik budaya dan sosial (*Environmental factors).*

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitiatif. Menurut Bogdan dalam Moleong (2007 : 4) menjelaskan bahwa "Motede kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati" Disisi lain Moleong (2007 : 6) menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian".

Informan Penelitian

Di Dalam penelitian ini yaitu penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya yang menjadi sumber dalam wawanncara adalah kepala bidang pendudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya karena kepala bidang sangat tau tentang kebijakan KIA tersebut. Dan yang menjadi sumber informasi tambahan adalah masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan proses kualitatif dalam penelitian, prosesnya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Proses pengolahan data merupakan usaha untuk memaknai data,baik yang berupa teks atau gambar. Proses pemaknaan teks atau gambar ini adalah langkah persiapan untuk melakukan analisis, dan memperdalam pemahaman atau pemaknaan tersebut

Rancangan Analisis Data

a. Reduksi Data
b. Penyajian Data
c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya . Dalam Dimensi ini Bukan dalam kejelasan komunikasi nya saja tetapi harus ada konsistensi dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang baik kepada masyarakat diharapkan masyarakat lebih mengerti tentang

kejelasan dalam program pembuatan KIA itu sendiri. Aspek Komunikasi ini dirasa kurang karena kurang nya informasi dan sosialisasi yang dirasakan kepada masyarakat sehingga banyak sekali masyarakat yang kurang mengertahui apa manfaat Dimiliki nya KIA. Keterlibatan steakholder tentang menjelaskan program KIA juga menjadi suatu hal yang penting dalam kesuksesan aspek komunikasi ini, sehingga si penerima kebijakan tidak mempunyai daya Tarik dalam membuat Kartu Identitas anak tersebut.

Dalam Sumber Daya Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan . Faktor sumber daya disini tidak ditemukan berbagai masalah yang sangat penting, Dikarenakan pegawai yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil ini telah memiliki ilmu dan kemampuan yang baik. Hal ini diperkuat pada saat penulis mendatangi Disduk Capil pelayanan KIA ini masyarakat yang akan membuat KIA dilayani dengan baik dan untuk pesrayaratan pun tidak berbelit-belit. Dalam hal sumber daya waktu pun untuk program KIA ini dirasa cukup baik karena Kartu Identitas Anak ini proses nya hanya sebentar tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam sumber daya finansial pun tidak ada kendala karena program KIA ini tidak dipungut biaya dan pelayanan KIA Disduk Capil Kota Tasikmalaya pun tidak meminta biaya sepeserpun kepada masyarakat.Jadi semua punya andil dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak tersebut.

Dalam segi Disposisi atau sikap dari para pelaksana sangat penting dalam suartu pendekataan kebijakan. Dan para pelaksana harus mengetahui maksud dan tujuan tersebut jika kebijakan ini ingin efektif. Para pelaksana disini membuat kartu identitas anak dan membuat sebuah laporan tentang pengerjaan kartu identitas anak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam dimensi Disposisi ini sudah cukup baik para pengawas pun selalu mengawasi para pelaksana dengan sebaik baiknya.

Hasil penelitian yang telah di lakukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam struktur birokrasi sudah dikatakan baik, terlihat dari SOP (Standar Operasional Prosedur) dibuat setelah kebijakan atau peraturan ini dikeluarkan. Telihat jelas bahwa dengan adanya SOP yang berlaku mendukung kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penulis dalam hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: Hasil dari pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan di disdukcapil kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan KIA yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sesuai dengan yang diharapkan. Prosedur dan ketentuan pun sudah dijalani dengan baik. Hasil dalam penelitian di lapangan terlihat bahwa kebijakan ini telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh petugas. Pegawai sangat cekatan dalam mekasanakan tugasnya dan melayani masyarakat dalam pelayanan KIA sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam mendata penduduk, pegawai hanya membutuhkan waktu yang tidak teralalu lama dalam membuat KIA tanpa dipungut biaya sepeserpun. Dalam Dimensi Komunikasi dan Sumber Daya Manusia Dirasa Masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali.

E. DAFTAR PUSTAKA

Kusnandar , I. (2012). Analisisi Kebijakan Publik. Bandung: Multazam

Moleong, J. Lexy. (2012).*Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosadakarya.

Winarno. 2012 *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung : ALFABETA.

_____. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Tachjan (2016), *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung :AIPI

Sumber – sumber lainnya :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 11 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan (KIA)